

# KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KEYNOTE SPEECH

pada  
**SEMINAR NASIONAL**  
tentang  
**“ASPEK HUKUM, SOSIAL DAN POLITIK  
PEMISAHAN POLRI DARI DEPHANKAM  
DALAM MEWUJUDKAN POLRI YANG MANDIRI”**

Jakarta, 24 Juli 1999

Oleh : *Drs. Roesmanhadi, SH*

Yth. Hadirin dan para peserta Seminar.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat.

Dari lubuk hati yang dalam saya merasa gembira atas prakarsa diadakannya seminar nasional yang membahas tentang perwujudan Polri yang mandiri. Penyelenggaraan seminar ini

merupakan salah satu bukti kepedulian masyarakat terhadap Polri karena menyadari bahwa Polri adalah milik segenap masyarakat Indonesia.



Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada pihak penyelenggara yang telah memberikan kehormatan kepada saya untuk bertindak sebagai keynote speaker

pada seminar ini, yang dirasakan akan sangat bermanfaat bagi pengembangan organisasi yang sedang saya pimpin baik pada masa sekarang maupun masa mendatang.

Para peserta seminar sekalian

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia saat ini sedang memasuki gerbang Indonesia baru menuju hidup berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis. Dalam tatanan baru tersebut, kita berupaya mewujudkan suatu masyarakat madani atau Civil Society. Masyarakat ini diartikan sebagai sebuah masyarakat dengan seperangkat pranata non pemerintah yang cukup kuat untuk menjadi penyeimbang dari kekuasaan negara dan pada saat yang sama mendorong pemerintah untuk menjalankan peranannya sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan menengah diantara berbagai kepentingan dalam masyarakat, serta mempunyai kemampuan untuk menghalangi atau mencegah negara untuk mendominasi dan mengecilkan peranan masyarakat (Gellner : 1995).

Sebagai salah satu prasyarat terbentuknya masyarakat madani tersebut, maka hukum hendaknya ditegakkan secara konsisten sehingga dapat tercipta rasa aman dalam suasana yang tertib dan penuh keteraturan. Dalam sistem demokratis, setiap warga negara memiliki hak, kewajiban dan andil yang sama sebagai pemilik negara sehingga hanya dengan terwujudnya supremasi hukum, kesamaan akan hak dan kewajiban serta andil tersebut dapat dijamin.

Melandaskan pada konsepsi universal inilah maka dirasakan perlunya Polri dipisahkan dari struktur ABRI, pemisahan ini diharapkan akan dapat memberikan peluang kepada Polri untuk membenahi diri sebagai institusi yang otonom dalam rangka melaksanakan perannya sebagai penegak hukum, pemelihara ketertiban dan pelindung serta pelayan masyarakat. Kemandirian Polri akan memperkecil kemungkinan usahapihak-pihak tertentu yang ingin mengintervensi pelaksanaan tugas Polri. Polisi adalah aparat yang sarat dengan kewenangan, dan dengan kewenangan tersebut Polisi memperoleh legitimasi untuk melakukan tindakan hukum, termasuk merampas hak asasi manusia pelanggar hukum. Dengan peran pentingnya tersebut, maka tentunya banyak pihak yang ingin memanfaatkan polisi untuk kepentingan mereka sendiri.

Kemandirian kepolisian juga diperlukan sebagai konsekuensi logis dari tatanan kehidupan masyarakat madani. Dalam kehidupan demokratis maka polisi hanya semata-mata mengabdikan kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dan bukan kepada penguasa seperti halnya di negara totalitarian dan otoriter. Dengan perannya sebagai penegak hukum dan pemelihara ketertiban,

polisi diharapkan dapat mewujudkan iklim yang kondusif sehingga aktifitas sosial dan politik masyarakat senantiasa seiring dengan perangkat aturan hukum yang disepakati bersama sebagai rambu pembatas aktifitas-aktifitas tersebut.

Hadirin dan peserta Seminar yang saya hormati,

Sebagai tindak lanjut pemisahan Polri dari struktur ABRI, maka Polri telah menggulirkan sejumlah langkah reformasi internal guna membenahi diri. Langkah tersebut ditempuh untuk mengubah sosok Polri seperti yang ada sekarang ini, menjadi sosok yang ideal sebagaimana diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat seperti yang dikemukakan terdahulu.

Perubahan struktural yang menjadi perhatian Polri adalah perlunya reposisi organisasi Polri sebagai lembaga pemerintah non departemen yang berada langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem yang diterapkan diharapkan bersifat "Integrated System" yaitu polisi nasional dengan standard nasional pada aspek-aspek yang bersifat umum, namun pembagian wilayah kepolisian daerah dan pengembangannya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah masing-masing pemerintah daerah.

Dari segi instrumental, Polri juga

mengadakan reformasi filosofi, visi, misi dan tujuan yang mengarah sebagai polisi rakyat yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri, profesional, melindungi dan mengayomi serta melayani masyarakat.

Pembenahan juga dilaksanakan pada aspek manajerial, baik manajemen sumber daya manusia yang lebih berkualitas, maupun bidang penunjang lain seperti halnya logistik dan anggaran. Demikian pula manajemen operasional, sistem operasional Polri diaplikasikan dengan secara sungguh-sungguh memperhatikan karakteristik situasi daerah masing-masing. Kita menyadari bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang amat plural. Di Indonesia dapat ditemui bermacam kelompok masyarakat, mulai masyarakat informasi dan industri yang dominan di perkotaan, masyarakat agraris di pedesaan hingga ke masyarakat pra-agraris yang masih primitif. Oleh karenanya meskipun memiliki "Standar Operating Procedure" yang sama, titik berat sistem pemolisian yang diterapkan, berbeda dari satu daerah ke daerah lain, baik itu sistem proaktif, reaktif, represif, maupun community policing.

Untuk itu tugas dan peran yang harus dimainkan oleh seluruh insan Polri di masa mendatang harus berbeda dengan

apa yang telah dijalankan selama ini. Polisi harus senantiasa dekat dengan masyarakat sebagai mitra penting dalam pelaksanaan tugas. Selain itu apa yang telah dilaksanakan oleh polisi harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (*Barbara Etter & Mick Palmer : 1995*).

Para Peserta Seminar sekalian,

Di samping perubahan berbagai aspek di atas, Polri berpendapat bahwa aspek terpenting yang perlu diperhatikan adalah perubahan kultural terutama sikap dan perilaku anggota Polri yang selama ini cenderung diwarnai oleh sikap militer. Perubahan ini tentu tidak mudah dan memerlukan waktu. Terlebih lagi banyak masalah yang berkaitan dengan perubahan sikap dan perilaku tersebut, yang berada di luar jangkauan kemampuan Polri; misalnya keterbatasan anggaran bagi kesejahteraan anggota, dan lingkungan masyarakat sendiri yang kurang kondusif terhadap upaya perubahan tersebut.

Oleh karena itu, melalui kegiatan seperti Seminar ini, saya mengharapkan masyarakat akan dapat makin jelas melihat sosok polisi Indonesia saat ini, termasuk segala keterbatasan dan kelemahannya, untuk selanjutnya mendukung proses pembenahan yang

sedang berjalan. Tanpa dukungan segenap warga masyarakat, kecil kemungkinan sosok polisi Indonesia yang ideal akan dapat diwujudkan.

Demikian amanat saya, semoga segala upaya yang telah kita lakukan bersama dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, khususnya jajaran Polri.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 24 Juli 1999

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK  
INDONESIA

Drs. ROESMANHADI, S.H.

JENDERAL POLISI